

BAB III

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan melalui suatu sistem yang terintegrasi dalam rangkaian siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang pelaksanaannya mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pemeriksaan sampai pada pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Kinerja keuangan masa lalu yakni kondisi keuangan selama periode 5 (lima) tahun, yaitu sejak Tahun 2010 hingga Tahun 2015 adalah sebagai dasar pijakan penyusunan penyusunan perencanaan keuangan 5 (lima) tahun ke depan. Keuangan daerah merupakan komponen penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk memperoleh proyeksi yang tepat mengenai kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan pemecahan permasalahan strategis secara tepat. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan melahirkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya belanja daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah secara makro ke dalam kerangka pengembangan yang lebih memberikan efek multiplier yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih merata. Untuk itu maka kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah perlu disusun dalam kerangka yang sistematis dan terpola.

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

a. Kinerja Pelaksanaan Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah Kabupaten Boyolali mengalami peningkatan yang cukup baik, hal ini terlihat dengan semakin meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan unsur-unsur lainnya. Dalam usaha optimalisasi pendapatan daerah menghadapi beberapa kendala seperti adanya beberapa jenis pajak dan retribusi yang sudah stagnasi dan perlu adanya kajian ulang terhadap pajak dan retribusi daerah yang sudah tidak memadai, kurangnya kesadaran sebagian masyarakat dalam memberikan kontribusi pendapatan daerah baik membayar pajak daerah maupun retribusi daerah.

Struktur pendapatan Kabupaten Boyolali pada dasarnya menunjukkan tingkatan yang lebih baik dari pada kebanyakan kabupaten dan kota di Indonesia. Kontribusi PAD terhadap total pendapatan pada seluruh kabupaten/kota di Indonesia rata-rata hanya 9,97% dari Tahun 2011-2014, namun kontribusi PAD Kabupaten Boyolali terhadap total pendapatan secara rerata 2011-2015 di atas rata-rata nasional yaitu 11,21%. Adapun realisasi pendapatan dibandingkan dengan target di RPJMD Tahun 2010-2015 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel III.1. Realisasi Pendapatan Dibandingkan dengan Target RPJMD Tahun Anggaran 2011-2015

NO	URAIAN	REALISASI ANGGARAN (Rp.000)														
		2011			2012			2013			2014			2015		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
A	PENDAPATAN	983.891.451	1.096.013.961	111%	1.099.701.129	1.271.240.329	116%	1.223.879.048	1.463.130.479	120%	1.350.460.363	1.673.664.643	124%	1.488.561.064	1.937.150.180	130%
1	PAD	78.000.000	96.737.565	124%	81.120.000	127.725.205	157%	84.364.800	160.752.447	191%	97.019.520	227.516.494	235%	100.900.301	260.633.616	258%
	Pajak Daerah	15.459.690	19.256.739	125%	15.850.000	23.282.495	147%	16.500.000	43.467.755	263%	28.265.000	53.983.465	191%	28.570.000	76.861.736	269%
	Retribusi Daerah	17.519.075	20.136.945	115%	18.920.000	36.721.243	194%	21.014.800	41.482.304	197%	21.254.520	54.305.486	256%	24.330.301	31.065.804	128%
	Pengelolaan Kekayaan Daerah	4.646.735	4.514.063	97%	4.700.000	5.509.165	117%	4.850.000	6.425.251	132%	4.950.000	9.809.474	198%	5.000.000	8.282.461	166%
	Lain-2 Pendapatan yang Sah	40.374.500	52.829.818	131%	41.650.000	62.212.302	149%	42.000.000	69.377.137	165%	42.550.000	109.418.069	257%	43.000.000	144.423.615	336%
2	Dana Perimbangan	747.960.696	757.145.871	101%	844.581.129.000	893.578.301	0%	948.338.248	968.601.409	102%	1.044.224.263	1.060.318.727	102%	1.159.535.394	1.092.341.267	94%
	Bagi Hasil Pajak/Bkn Pajak	39.000.000	48.501.909	124%	39.000.000	52.915.755	136%	39.400.000	37.681.928	96%	25.500.000	36.002.551	141%	26.250.000	35.288.695	134%
	DAU	641.787.696	641.483.262	100%	738.055.850	780.301.856	106%	841.383.669	871.685.981	104%	950.763.546	943.220.456	99%	1.064.855.171	968.089.632	91%
	DAK	67.173.000	67.160.700	100%	67.525.279	60.360.690	89%	67.554.579	59.233.500	88%	67.960.717	81.095.720	119%	68.430.223	88.962.940	130%
3	Lain-Lain Pendapatan Sah	157.930.755	242.130.525	153%	174.000.000	249.936.823	144%	191.176.000	333.776.623	175%	209.216.580	385.829.422	184%	228.125.369	584.175.297	256%
	Pendapatan Hibah		4.995.846			170.045			4.716.952			7.771.641			21.958.312	
	Dana Darurat					-			-			-				
	Bagi Hasil Pajak Provinsi	30.250.000	39.852.814	132%	30.400.000	54.047.109	178%	30.500.000	62.142.167	204%	30.450.000	83.174.405	273%	30.500.000	106.801.964	350%
	Dana Penyesuaian dan Ot. Khusus	106.000.000	174.730.880	165%	121.900.000	167.626.904	138%	138.966.000	237.833.656	171%	157.031.580	261.782.884	167%	175.875.369	413.125.282	235%
	Bantuan Keuangan Provinsi	21.680.755	22.550.985	104%	21.700.000	28.092.765	129%	21.710.000	29.083.848	134%	21.735.000	33.100.492	152%	21.750.000	42.289.739	194%

Sumber Data: DPPKAD Kabupaten Boyolali

Struktur pendapatan ini menunjukkan bahwa sumber pendapatan sangat banyak yang berasal dari Pemerintah (APBN), atau secara umum APBD Kabupaten Boyolali masih belum mandiri. Namun demikian, sebagaimana sudah diuraikan pada bagian sebelumnya, berdasarkan rata-rata kontribusi PAD seluruh kabupaten dan kota di Indonesia, maka kontribusi PAD Kabupaten Boyolali terhadap APBD-nya tergolong tinggi yaitu 13,59% pada Tahun 2014 sedangkan rata-rata Kabupaten/Kota seluruh Indonesia adalah sebesar 11,10%. Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka pada tahun 2013 terjadi lonjakan PAD khususnya Pajak Daerah, hal ini terjadi karena adanya pengalihan kewenangan Pemungutan Pajak PBB P2 dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.

b. Kinerja Pelaksanaan Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja daerah diarahkan pada peningkatan proporsi belanja untuk memihak kepentingan publik, di samping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintahan. Dalam penggunaannya, belanja daerah harus tetap mengedepankan efisiensi, efektifitas dan penghematan sesuai dengan prioritas, yang diharapkan dapat memberikan dukungan program-program strategis daerah.

Adapun realisasi belanja dibandingkan dengan target di RPJMD Tahun 2010-2015 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel III.2. Realisasi Belanja Dibandingkan dengan Target RPJMD Tahun Anggaran 2011-2015

NO	URAIAN	REALISASI ANGGARAN (Rp.000)														
		2011			2012			2013			2014			2015		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
B	BELANJA	1.036.294.300	1.101.848.594	106%	1.154.816.370	1.269.226.809	110%	1.275.596.866	1.421.830.958	111%	1.409.589.189	1.617.991.643	115%	1.549.267.874	1.832.767.459	118%
1	B. Tak Langsung	824.797.007	799.711.690	97%	936.974.161	886.448.915	95%	1.057.367.980	970.527.558	92%	1.184.813.437	1.067.759.299	90%	1.317.748.851	1.205.647.561	91%
	B. Pegawai	747.787.696	706.707.689	95%	859.955.850	777.598.506	90%	980.349.669	837.599.339	85%	1.107.795.126	920.321.358	83%	1.240.730.540	954.269.355	77%
	B. Bunga	75.000	27.372	36%	75.000	11.825	16%	75.000	-		75.000	-		75.000		
	B. Hibah	16.296.035	16.932.113	104%	16.305.035	41.761.915	256%	16.305.035	60.237.526	369%	16.305.035	63.560.321	390%	16.305.035	57.720.025	354%
	B. Bansos	20.979.625	33.110.161	158%	20.979.625	5.070.133	24%	20.979.625	3.292.630	16%	20.979.625	3.204.078	15%	20.979.625	8.313.969	40%
	B. Bagi Hasil	3.249.533	2.968.748	91%	3.249.533	2.950.387	91%	3.249.533	94.216	3%	3.249.533	99.511	3%	3.249.533	8.197.128	252%
	B. Bantuan Keuangan	33.880.072	39.965.607	118%	33.880.072	59.056.149	174%	33.880.072	69.303.847	205%	33.880.072	80.574.031	238%	33.880.072	177.147.084	523%
	B. Tak Terduga	2.529.046	-		2.529.046	-		2.529.046	-		2.529.046	-		2.529.046	-	
2	B. Langsung	211.497.293	302.136.904	143%	217.842.209	382.777.894	176%	218.228.886	451.303.400	207%	224.775.752	550.232.344	245%	231.519.023	627.119.898	271%
	B. Pegawai, Barang Jasa, Modal	12.513.831	18.500.739	148%	12.889.245	32.350.317	251%	13.275.922	27.784.148	209%	13.674.199	32.183.332	235%	14.084.424	39.800.939	283%
	B. Barang & Jasa	87.401.466	145.199.143	166%	90.023.509	142.669.010	158%	90.023.509	174.407.527	194%	92.724.214	214.196.195	231%	95.505.940	277.143.494	290%
	B. Modal	111.581.996	138.437.022	124%	114.929.455	207.758.567	181%	114.929.455	249.111.725	217%	118.377.339	303.852.817	257%	121.928.659	310.175.465	254%

Sumber Data: DPPKAD Kabupaten Boyolali

Berdasarkan komposisinya Belanja Tidak Langsung pada tahun 2011-2015 didominasi oleh belanja pegawai. Hal ini disebabkan adanya kebijakan pemerintah pusat untuk meningkatkan belanja pegawai sedangkan belanja langsung didominasi oleh belanja modal yang merupakan dampak dari kebijakan pengelolaan belanja yang diarahkan pada peningkatan proporsi belanja modal.

c. Kinerja Pelaksanaan Pembiayaan Daerah

Komponen penerimaan pembiayaan Pemerintah Kabupaten Boyolali pada tahun 2011-2015 utamanya didominasi oleh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun lalu (SiLPA). Pada umumnya SiLPA akan menjadi alternatif pertama yang akan digunakan pemerintah daerah apabila terjadi defisit anggaran. Ada tidaknya SiLPA dan besar kecilnya SiLPA sangat tergantung pada tingkat belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah serta kinerja pendapatan daerah.

Jika anggaran pemerintah daerah mengalami SiLPA maka kelebihan dana tersebut dapat dialokasikan ke pengeluaran pembiayaan dalam bentuk investasi keuangan melalui pos penyertaan modal pemerintah daerah. Hal tersebut juga terjadi di Pemerintah Kabupaten Boyolali di mana komponen pengeluaran pembiayaan pada Tahun 2010-2015 didominasi oleh penyertaan modal pemerintah. Struktur realisasi pembiayaan daerah pada Tahun 2010-2015 dibandingkan dengan target di RPJMD tahun 2010-2015 dapat dilihat pada Tabel III.3 dan perkembangan neraca daerah dapat dilihat sebagaimana Tabel III.4:

Tabel III.3. Realisasi Pembiayaan Dibandingkan dengan Target RPJMD Tahun Anggaran 2011-2015

NO	URAIAN	REALISASI ANGGARAN (Rp.000)														
		2011			2012			2013			2014			2015		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
C	PEMBIAYAAN															
1	Penerimaan Pembiayaan	60.535.539	86.407.377	143%	68.870.241	80.875.670	117%	64.597.818	84.573.452	131%	72.508.826	118.506.047	163%	74.251.810	162.702.163	219%
	SiLPA	53.474.425	81.249.340	152%	54.709.241	73.640.306	135%	51.336.818	73.720.210	144%	67.247.826	118.136.883	176%	68.490.810	162.441.049	237%
	Pinjaman Daerah	-	-		4.000.000	-		4.500.000	-		5.000.000	-		5.500.000	-	
	Penerimaan Kembali	2.061.114	5.158.037	250%	8.161.000	7.161.114	88%	8.761.000	9.653.064	110%	261.000	261.114	100%	261.000	261.114	100%
	Penerimaan Piutang	2.000.000	-		-	74.250		-	1.200.178		-	108.050		-	-	-
2	Pengeluaran Pembiayaan	8.132.690	6.932.437	85%	11.755.000	9.168.979	78%	12.880.000	7.736.000	60%	13.380.000	11.738.000	88%	13.545.000	31.353.000	231%
	Penyertaan Modal	5.088.690	6.888.690	135%	7.711.000	8.472.115	110%	8.336.000	7.736.000	93%	8.336.000	11.738.000	141%	8.001.000	29.353.000	367%
	Pembayaran Utang	3.044.000	43.747	1%	4.044.000	196.864	5%	4.544.000	-		5.044.000	-		5.544.000	-	
	Pemberian Pinjaman Daerah				-	500.000								-	2.000.000	
	Pembiayaan Netto	52.402.849	79.474.940	152%	55.115.241	71.706.691	130%	51.717.818	76.837.452	149%	59.128.826	106.768.047	181%	60.706.810	131.349.163	216%

Sumber Data: DPPKAD Kabupaten Boyolali

Tabel III.4. Perkembangan Neraca Daerah

URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aset					
Aset Lancar					
Kas Di Kas Daerah	65.842.271.829,00	72.001.453.892,00	116.798.489.738	150.456.148.580,00	522.918.688.707,00
Kas Di Bendahara Penerimaan	239.694.842,00	343.614.558,00	68.528.074,00	96.260.128,00	(96.373.054,00)
Kas Di Bendahara Pengeluaran	263.504.678,00	18.528.537,00	233.078.623,00	18.465.228,00	11.808.404.391,00
Kas Di Badan Layanan Umum Daerah	7.613.523.281,00	1.706.469.120,00	1.106.861.313,00	9.257.970.230,00	37.276.889.249,00
Kas Di Bendahara Dana Kapitasi JKN	0,00	0,00	0,00	2.712.877.498,00	60.412.000,00
Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piutang Pajak	250.355.380,00	250.355.380,00	25.946.666.585,00	27.967.762.066,70	27.967.762.066,70
Piutang Retribusi	5.197.845.251,00	4.706.217.591,00	8.334.758.083,31	5.294.563.129,00	5.294.563.129,00
Piutang Bagian Lancar Penjualan Angsuran	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piutang Fasilitas Sosial Dan Fasilitas Umum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piutang Lain-Lain	300.451.878,82	1.292.091.878,23	574.032.621,41	464.962.471,41	9.851.458.563,41
Piutang PAD Lain Nya	2.831.655.146,00	1.435.442.767,00	9.502.036.593,60	8.525.900.522,00	8.525.900.522,00
Persediaan	9.747.838.921,00	17.218.125.886,00	11.251.428.434,00	11.543.515.205,00	0,00
Jumlah Aset Lancar	92.287.141.206,82	98.972.299.609,23	173.815.880.065,32	216.338.425.058,11	623.607.741.574,11
Investasi Jangka Panjang					
Investasi Non Permanen	5.206.742.500,00	5.128.968.300,00	2.300.496.873,00	2.300.496.873,00	2.300.496.873,00
Investasi Permanen	71.019.253.128,90	80.096.040.098,22	88.754.804.388,75	101.610.742.125,30	101.610.742.125,30
Jumlah Investasi Jangka Panjang	76.225.995.628,90	85.225.008.398,22	91.055.301.261,75	103.911.238.998,30	103.911.238.998,30

URAIAN	2011 (1)	2012 (2)	2013 (3)	2014 (4)	2015 (5)
Aset Tetap					
Tanah	93.027.015.158,00	401.404.734.372	411.683.173.632,00	412.267.060.542,00	412.382.850.542,00
Peralatan dan Mesin	230.562.224.762,90	273.447.070.217,83	301.604.547.865,84	347.916.092.098,29	374.076.826.843,29
Gedung dan Bangunan	501.822.431.905,60	569.679.545.853,60	675.651.976.493,94	792.901.990.361,89	835.050.538.945,89
Jalan, Irigasi, Dan Jaringan	611.521.740.145,71	699.172.524.406,71	793.066.415.826,71	904.393.945.390,71	950.439.817.259.71
Aset Tetap Lainnya Kontruksi Dalam Pengerajan	53.469.220.866,97 0,00	57.571.492.140,77 305.041.300,00	60.490.744.341,13 172.419.600,95	71.016.505.552,13 14.995.271.125,00	75.674.206.800,13 14.995.271.125,00
Jumlah Aset Tetap	1.490.402.632.839,18	1.490.402.632.839,18	2.242.669.277.760,56	2.543.490.865.070,02	2.662.619.511.516,02
Dana Cadangan					
Jumlah Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aset Lainnya					
Tagihan Penjualan Angsuran	2.350.029.918,13	2.088.915.539,31	1.827.801.096,90	1.566.686.654,49	1.566.686.654,49
Tagihan Tuntutan Ganti Rugi Kerugian Daerah	273.138.029,00	208.083.029,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
Aset Tidak Berwujud Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	900.972.893,00 19.420.462,00	1.702.772.893,00 19.420.462,00	2.323.412.093,00 0,00	2.881.137.583,00 0,00	2.881.137.583,00 0,00
Aset Lain-Lain	46.281.903.263,70	38.763.818.263,70	56.794.719.672,83	70.616.416.971,83	70.616.416.971,83
Jumlah Aset Lainnya	49.825.464.565,83	42.783.010.187,01	60.945.932.862,73	75.070.241.209,32	75.070.241.209,32
Jumlah Aset	1.708.741.234.240,73	2.228.560.726.485,37	2.568.486.391.950,36	2.938.810.770.335,75	3.465.208.733.297,75
Kewajiban					
Kewajiban Jangka Pendek					
Utang Perhitungan Fihak Ketiga (Pfk)	78.993.189,00	6.241.496,00	1.546.185,00	4.412.697,00	528.864.623,00
Utang Bunga	11.822.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

URAIAN	2011 (2)	2012 (3)	2013 (4)	2014 (5)	2015 (6)
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang-Utang Obligasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang-Utang Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang- Utang Pemerintah Provinsi	196.864.522,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang- Utang Pemerintah Kabupaten / Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utang Jangkapendek Lainnya	0,00	0,00	0,00	32.262.281,00	32.262.281,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	287.680.521,78	6.241.496,00	1.546.185,00	36.674.978,00	561.126.904,00
Kewajiban Jangka Panjang					
Utang Dalam Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Kewajiban	287.680.521,78	6.241.496,00	1.546.185,00	36.674.978,00	561.126.904,00
Ekuitas Dana					
Ekuitas Dana Lancar					
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	73.640.306.599,00	73.720.210.053,00	118.136.883.489,00	162.441.048.839,00	0,00
Cadangan Untuk Piutang	8.580.307.655,82	7.684.107.616,23	44.357.493.883,32	42.253.188.189,11	42.253.188.189,11
Cadangan Untuk Persediaan	9.747.838.921,00	17.218.125.886,00	11.251.428.434,00	11.543.515.205,00	0,00
Dana Yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	(208.687.332,78)	0,00	0,00	(32.262.281,00)	(32.262.281,00)

URAIAN	2011 (1)	2012 (2)	2013 (3)	2014 (4)	2015 (5)
Pendapatan Yang Ditangguhkan	239.694.842,00	343.614.558,00	68.528.074,00	96.260.128,00	10.000,00
Jumlah Ekuitas Dana Lancar	91.999.460.685,04	98.966.058.113,23	173.814.333.880,32	216.301.750.080,11	42.220.935.908,11
Ekuitas Dana Investasi					
Diinvestasikan Dalam Investasi Jangka Panjang	76.225.995.628,90	85.225.008.398,22	91.055.301.261,75	103.911.238.998,30	103.911.238.998,30
Diinvestasikan Dalam Aset Tetap	1.490.402.632.839,18	2.001.580.408.290,91	2.242.669.277.760,56	2.543.490.865.070,01	2.662.619.511.516,02
Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya (Tidak Termasuk Dana Cadangan)	49.825.464.565,83	42.783.010.187,01	60.945.932.862,73	75.070.241.209,32	75.070.241.209,32
Dana Yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Hutang Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Ekuitas Dana Investasi	1.616.454.093.033,91	2.129.588.426.876,14	2.394.670.511.885,04	2.722.472.345.277,64	2.841.600.991.723,64
Ekuitas Dana Cadangan					
Jumlah Ekuitas Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Ekuitas Dana	1.708.453.533.718,95	2.228.554.484.989,37	2.568.484.845.765,36	2.938.774.095.357,75	2.883.821.927.631,75
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana	1.708.741.234.240,73	2.228.560.726.485,37	2.568.486.391.950,36	2.938.810.770.335,75	2.884.383.054.535,75

Sumber Data: DPPKAD Kabupaten Boyolali

3.2. Kebijakan Pengelola Keuangan Masa Lalu

3.2.1. Arah Pengelolaan Pendapatan Daerah

Beberapa faktor yang mempengaruhi pengelolaan pendapatan daerah di samping kemampuan aparat dalam mengelola pendapatan daerah adalah masih rendahnya pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat serta belum bergairahnya kegiatan dunia usaha, laju pertumbuhan penduduk, dan laju inflasi.

Beberapa arah yang akan dilakukan dalam mengoptimalkan Pendapatan Daerah yaitu:

1. Meningkatkan pendapatan daerah melalui usaha intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak dan retribusi daerah juga mengembangkan kerjasama operasi/investasi pihak ketiga dengan memanfaatkan aset Kabupaten Boyolali yang dapat dikaryakan, agar seluruh potensi pendapatan yang ada dapat masuk ke Kas Daerah dan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemungutan pendapatan daerah melalui perbaikan sistem dan prosedur, misal penagihan dipermudah dengan cara jemput bola selain itu perlu dikembangkan sistem pembayaran pajak secara *on-line* dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan;
2. Meningkatkan kinerja pendapatan daerah melalui penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah;
3. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah;
4. Meningkatkan peran dan fungsi Lembaga Teknis dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan;
5. Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah; dan
6. Melakukan evaluasi terhadap kecukupan dan kelayakan produk hukum yang ada serta mengusulkan revisi atau usulan baru tentang produk hukum yang berkaitan dengan tarif yang sesuai kebutuhan serta yang mengatur tambahan penyertaan modal BUMD.

Proyeksi pendapatan ini merupakan sekumpulan angka-angka perkiraan yang dapat berubah dan atau berbeda atau bersifat indikatif sepanjang faktor-faktor penghitungnya atau asumsi-temsinya tidak mengalami perubahan. Dari kondisi keuangan daerah Tahun 2010-2015, maka dapat disusun data prediksi pendapatan daerah Tahun 2016-2021.

Tabel III.5. Prediksi Pendapatan Tahun Anggaran 2016-2021

NO	U R A I A N	PREDIKSI ANGGARAN (000)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
A	PENDAPATAN	2.087.937.454	2.121.685.349	2.228.754.469	2.342.196.878	2.470.018.055	2.609.503.215
1	PAD	250.959.622	276.667.608	305.438.525	337.352.845	372.764.636	412.068.642
	Pajak Daerah	69.891.500	75.482.820	81.521.446	88.043.161	95.086.614	102.693.543
	Retribusi Daerah	14.709.105	15.297.469	15.909.368	16.545.743	17.207.572	17.895.875
	Pengelolaan Kekayaan Daerah	8.695.610	9.304.303	10.234.733	11.258.206	12.384.027	13.622.430
	Lain-2 Pendapatan yang Syah	157.663.407	176.583.016	197.772.978	221.505.735	248.086.423	277.856.794
2	Dana Perimbangan	1.504.412.565	1.479.529.081	1.530.428.305	1.580.632.550	1.638.633.506	1.697.241.799
	Bagi Hasil Pajak/Bkn Pajak	44.180.456	46.680.882	49.322.822	52.114.285	55.063.733	58.180.106
	DAU	1.032.744.000	1.005.360.090	1.053.617.374	1.101.030.156	1.156.081.664	1.211.573.584
	DAK	427.488.109	427.488.109	427.488.109	427.488.109	427.488.109	427.488.109
3	Lain-Lain Pendapatan Sah	332.565.267	365.488.660	392.887.639	424.211.483	458.619.913	500.192.774
	Pendapatan Hibah	1.168.360	-	-	-	-	-
	Bagi Hasil Pajak Provinsi	107.456.279	130.351.032	145.993.155	164.972.265	186.418.659	214.381.457
	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	167.801.074	176.191.128	185.000.684	194.250.718	203.963.254	214.161.417
	Bantuan Keuangan Provinsi	56.139.554	58.946.500	61.893.800	64.988.500	68.238.000	71.649.900

Sumber Data: DPPKAD Kabupaten Boyolali

Asumsi-asumsi terkait prakiraan pendapatan daerah Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah setiap tahun akan mengalami kenaikan sehubungan dengan dibangunnya sarana prasarana pelayanan masyarakat yang dapat dijadikan obyek PAD dan pengenaan pajak sesuai tarif yang semestinya bukan berdasarkan kesanggupan wajib pajak.
2. Retribusi daerah akan diharapkan mengalami kenaikan dengan adanya rencana penyesuaian tarif baru untuk retribusi daerah yang sudah tidak sesuai kondisi sekarang.
3. Semakin meningkatnya pendapatan Lain-lain PAD yang sah dengan dibentuknya BLUD RSUD Banyudono, RSUD Simo dan BLUD Puskesmas.
4. Semakin meningkatnya dana perimbangan.

3.2.2. Arah Pengelolaan Belanja Daerah

Dalam rangka mengimplementasikan visi RPJPD secara terpadu dan berkelanjutan dengan melibatkan masyarakat, dunia usaha, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan investor sebagai ujung tombak pengembangan berbagai produk unggulan Pemerintah Kabupaten Boyolali.

Berdasarkan asumsi dan kondisi tersebut, kebijakan pengelolaan Belanja Daerah akan diarahkan pada:

1. Membayai program dan kegiatan yang menjadi prioritas Kabupaten Boyolali, selama 5 (lima) tahun ke depan, dengan skala prioritas pada Program Kegiatan yang langsung menyentuh kepentingan dan kebutuhan masyarakat;
2. Pemenuhan kebutuhan pelaksanaan program prioritas daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang harus dilaksanakan;
3. Meningkatkan proporsi Belanja Modal yang dapat memberi dampak besar dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemberdayaan rakyat;
4. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas belanja daerah melalui penyusunan standar harga serta intensifikasi pengawasan baik oleh aparatur pengawas fungsional maupun masyarakat; dan
5. Meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan barang daerah sesuai Standar Akuntansi Pemerintah antara lain melalui peningkatan tertib administrasi dan tertib pelaporan mulai dari tahap perencanaan, penatausahaan, pelaksanaan atau implementasi, pertanggungjawaban atas pelaksanaan dan evaluasi kinerja, dengan didukung sumber daya aparatur yang semakin bersih dan profesional.

Prakiraan Belanja Daerah 5 (lima) tahun yang akan datang sesuai dengan arah pengelolaan belanja daerah adalah seperti tercantum pada Tabel berikut:

Tabel III.6. Prediksi Belanja Tahun Anggaran 2016-2021

NO	URAIAN	PREDIKSI (000)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
B	BELANJA	2.150.966.568	2.164.022.743	2.307.715.029	2.464.988.389	2.635.332.262	2.834.163.731
1	B. Tak Langsung:	1.415.727.755	1.417.328.485	1.530.722.505	1.654.408.565	1.791.118.457	1.940.451.975
	B. Pegawai	1.062.606.762	1.082.335.904	1.174.334.456	1.274.152.885	1.382.455.880	1.499.964.630
	B. Hibah	19.539.575	27.309.113	34.136.391	42.670.488	53.338.110	66.672.638
	B. Bansos	10.940.000	12.034.000	13.237.400	14.561.140	16.017.254	17.618.979
	B. Bagi Hasil	8.645.662	9.078.029	9.743.081	10.458.890	11.229.419	12.058.942
	B. Bantuan Keuangan	311.995.756	284.071.439	296.771.177	309.565.162	325.077.794	341.136.786
	B. Tak Terduga	2.000.000	2.500.000	2.500.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
2	B. Langsung:	735.238.813	746.694.258	776.992.524	810.579.824	844.213.805	893.711.756
	B. Pegawai	68.481.299	52.268.598	54.389.477	56.740.588	59.094.966	62.559.823
	B. Barang & Jasa	286.656.943	306.144.646	318.566.935	332.337.728	346.127.660	366.421.820
	B. Modal	380.100.571	388.281.014	404.036.112	421.501.508	438.991.179	464.730.113

Sumber Data: DPPKAD Kabupaten Boyolali

Asumsi yang dijadikan dasar dalam penyusunan prakiraan belanja Tahun 2016-2021 meliputi:

1. Belanja tidak langsung utamanya belanja pegawai meningkat dari tahun ke tahun karena adanya dampak dari kebijakan pemerintah pusat untuk menaikkan gaji pegawai serta adanya gaji ke-13, bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa;
2. Belanja langsung utamanya belanja modal meningkat dari tahun ke tahun terutama hal penyediaan sarana prasarana umum guna mendukung visi misi; dan
3. Untuk efisiensi belanja tidak langsung, maka belanja yang tidak wajib dan belanja bantuan sosial dibatasi.

3.2.3. Arah Pengelolaan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan merupakan penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Dalam era ekonomi dan desentralisasi fiskal sekarang ini pemerintah daerah perlu meningkatkan keahlian dalam manajemen dana dan manajemen investasi agar keuangan daerah dapat dikelola secara optimal sehingga memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Misi dan motivasi kegiatan investasi atau penyertaan modal tidak hanya semata-mata menambah penerimaan daerah namun untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan pelayanan publik.

Melihat kondisi tersebut di atas maka asumsi yang dijadikan dasar dalam penyusunan perkiraan pembiayaan adalah sebagai berikut:

1. Penerimaan pembiayaan terutama SiLPA akan bersaldo positif yang memberikan indikasi adanya kesehatan fiskal dan kesinambungan fiskal daerah yang baik;
2. Pengeluaran pembiayaan utamanya penyertaan modal memberikan manfaat ekonomi, sosial dan politik dari investasi atau penyertaan modal yang diperoleh; dan
3. Meningkatkan penyertaan modal bagi Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) dan Koperasi.

Berdasarkan asumsi dan kondisi tersebut kebijakan pengelolaan pemberian daerah akan diarahkan pada:

1. Pemanfaatan SiLPA sesuai dengan peruntukannya dan prioritas belanja lainnya; dan
2. Meningkatkan optimalisasi penyertaan modal ke BUMD.

Sebagai implementasi arah kebijakan pengelolaan pemberian daerah maka dalam 5 (lima) tahun ke depan perkiraan pemberian daerah akan terlihat pada tabel berikut:

Tabel III.7. Prediksi Pemberian Tahun Anggaran 2016-2021

NO	URAIAN	PREDIKSI (000)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
C	PEMBIAYAAN						
1	Penerimaan Pemberian	75.261.114	-	-	-	-	-
	SiLPA	75.000.000	-	-	-	-	-
	Pinjaman Daerah	261.114	-	-	-	-	-
	Penerimaan Kembali	-	-	-	-	-	-
	Penerimaan Piutang	-	-	-	-	-	-
2	Pengeluaran Pemberian	12.232.000	27.125.000	25.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
	Penyertaan Modal	12.232.000	27.125.000	25.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
	Pembayaran Utang	-	-	-	-	-	-
	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-
	Pemberian Netto	63.029.114	(27.125.000)	(25.000.000)	(20.000.000)	(20.000.000)	(20.000.000)
	Sisa Lebih/Kurang Pemberian		-	-	-	-	-

Sumber Data: DPPKAD Kabupaten Boyolali

3.3. Kebijakan Umum Anggaran

Sebagai pijakan dalam menentukan arah Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2016-2021 di bawah ini disampaikan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2011-2015 sebagai berikut:

Tabel III.8. Realisasi APBD Kabupaten Boyolali

Tahun Anggaran 2011-2015

NO	URAIAN	REALISASI ANGGARAN (dalam 000)				
		2011	2012	2013	2014	2015
A	Pendapatan	1.096.013.961	1.463.130.479	1.673.664.643	1.937.150.180	1.937.150.180
1	PAD	96.737.565	160.752.447	227.516.494	260.633.616	260.633.616
	Pajak Daerah	19.256.739	43.467.755	53.983.465	76.861.736	76.861.736
	Retribusi Daerah	20.136.945	41.482.304	54.305.486	31.065.804	31.065.804
	Pengelolaan	4.514.063	6.425.251	9.809.474	8.282.461	8.282.461

NO	URAIAN	REALISASI ANGGARAN (dalam 000)				
		2011	2012	2013	2014	2015
	Kekayaan Daerah					
	Lain-lain Pendapatan yang Sah	52.829.818	69.377.137	109.418.069	144.423.615	144.423.615
2	Dana Perimbangan	757.145.871	968.601.409	1.060.318.727	1.092.341.267	1.092.341.267
	Bagi Hasil Pajak/Bkn Pajak	48.501.909	37.681.928	36.002.551	35.288.695	35.288.695
	DAU	641.483.262	871.685.981	943.220.456	968.089.632	968.089.632
	DAK	67.160.700	59.233.500	81.095.720	88.962.940	88.962.940
3	Lain-Lain Pendapatan Sah	242.130.525	333.776.623	385.829.422	584.175.297	584.175.297
	Pendapatan Hibah	4.995.846	4.716.952	7.771.641	21.958.312	21.958.312
	Dana Darurat	0	-	-	0	0
	Bagi Hasil Pajak Provinsi	39.852.814	62.142.167	83.174.405	106.801.964	106.801.964
	Dana Penyesuaian dan Ot. Khusus	174.730.880	237.833.656	261.782.884	413.125.282	413.125.282
	Bantuan Keuangan Provinsi	22.550.985	29.083.848	33.100.492	42.289.739	42.289.739
B	BELANJA	1.101.848.594	1.269.226.809	1.421.830.958	1.617.991.643	1.832.767.459
1	B. Tak Langsung	799.711.690	886.448.915	970.527.558	1.067.759.299	1.205.647.561
	B. Pegawai	706.707.689	777.598.506	837.599.339	920.321.358	954.269.355
	B. Bunga	27.372	11.825	-	-	0
	B. Hibah	16.932.113	41.761.915	60.237.526	63.560.321	57.720.025
	B. Bansos	33.110.161	5.070.133	3.292.630	3.204.078	8.313.969
	B. Bagi Hasil	2.968.748	2.950.387	94.216	99.511	8.197.128
	B. Bantuan Keuangan	39.965.607	59.056.149	69.303.847	80.574.031	177.147.084
	B. Tak Terduga	-	-	-	-	-
2	B. Langsung	302.136.904	382.777.894	451.303.400	550.232.344	627.119.898
	B. Pegawai, Barang Jasa, Modal	18.500.739	32.350.317	27.784.148	32.183.332	39.800.939
	B. Barang & Jasa	145.199.143	142.669.010	174.407.527	214.196.195	277.143.494
	B. Modal	138.437.022	207.758.567	249.111.725	303.852.817	310.175.465
	SURPLUS / DEFISIT	-5.834.633	2.013.518	41.229.431	55.673.000	-131.349.162
C	PEMBIAYAAN					
1	Penerimaan Pembiayaan	86.407.377	80.875.670	84.573.452	118.506.047	162.702.163
	SiLPA	81.249.340	73.640.306	73.720.210	118.136.883	162.441.049
	Pinjaman Daerah	-	-	-	-	0
	Penerimaan Kembali	5.158.037	7.161.114	9.653.064	261.114	261.114

NO	URAIAN	REALISASI ANGGARAN (dalam 000)				
		2011	2012	2013	2014	2015
	Penerimaan Piutang	-	74.250	1.200.178	108.050	-
2	Pengeluaran Pembiayaan	6.932.437	9.168.979	7.736.000	11.738.000	31.353.000
	Penyertaan Modal	6.888.690	8.472.115	7.736.000	11.738.000	29.353.000
	Pembayaran Utang	43.747	196.864	-	-	-
	Pemberian Pinjaman Daerah	-	500.000	-	-	2.000.000
	Pembiayaan Netto	79.474.940	71.706.691	76.837.452	106.768.047	131.349.163
	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan	0	0	0	0	0

Sumber Data: DPPKAD Kabupaten Boyolali

Sebagaimana diuraikan pada awal dokumen ini bahwa visi Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2021 pada akhirnya adalah Mewujudkan Boyolali Yang Maju dan Lebih Sejahtera. Dengan demikian keuangan daerah akan digunakan semaksimal mungkin bagi terwujudnya kondisi tersebut. Adapun langkah-langkah kerja yang akan dilalui untuk mencapai hal tersebut dijabarkan dalam misi, strategi, agenda, kebijakan dan program sebagaimana terurai dalam dokumen ini.

Kebijakan umum anggaran dalam mencapai hal tersebut meliputi:

1. Mengimplementasikan anggaran berbasis kinerja secara terpadu dan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
2. Implementasi penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah, dengan mengintegrasikan ke dalam Sistem Informasi Teknologi.

Dengan arah kebijakan tersebut, dapat digambarkan prakiraan/prediksi APBD Tahun 2016-2021 Kabupaten Boyolali sebagai berikut:

Tabel III.9. Prediksi APBD Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2016-2021

No	URAIAN	PREDIKSI (dalam 000)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
A	PENDAPATAN	2.087.937.454	2.121.685.349	2.228.754.469	2.342.196.878	2.470.018.055	2.609.503.215
1	PAD	250.959.622	276.667.608	305.438.525	337.352.845	372.764.636	412.068.642
	Pajak Daerah	69.891.500	75.482.820	81.521.446	88.043.161	95.086.614	102.693.543
	Retribusi Daerah	14.709.105	15.297.469	15.909.368	16.545.743	17.207.572	17.895.875
	Pengelolaan Kekayaan Daerah	8.695.610	9.304.303	10.234.733	11.258.206	12.384.027	13.622.430
	Lain-2 Pendapatan yang Syah	157.663.407	176.583.016	197.772.978	221.505.735	248.086.423	277.856.794
2	Dana Perimbangan	1.504.412.565	1.479.529.081	1.530.428.305	1.580.632.550	1.638.633.506	1.697.241.799
	Bagi Hasil Pajak/Bkn Pajak	44.180.456	46.680.882	49.322.822	52.114.285	55.063.733	58.180.106
	DAU	1.032.744.000	1.005.360.090	1.053.617.374	1.101.030.156	1.156.081.664	1.211.573.584
	DAK	427.488.109	427.488.109	427.488.109	427.488.109	427.488.109	427.488.109
3	Lain-Lain Pendapatan Sah	332.565.267	365.488.660	392.887.639	424.211.483	458.619.913	500.192.774
	Pendapatan Hibah	1.168.360	-	-	-	-	-
	Bagi Hasil Pajak Provinsi	107.456.279	130.351.032	145.993.155	164.972.265	186.418.659	214.381.457
	Dana Penyesuaian dan Ot. Khusus	167.801.074	176.191.128	185.000.684	194.250.718	203.963.254	214.161.417
	Bantuan Keuangan Provinsi	56.139.554	58.946.500	61.893.800	64.988.500	68.238.000	71.649.900

No	URAIAN	PREDIKSI (dalam 000)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
B	BELANJA	2.150.966.568	2.104.560.349	2.213.754.469	2.332.196.878	2.460.018.055	2.599.503.215
1	B. Tak Langsung	1.415.727.755	1.357.866.091	1.436.761.945	1.521.617.054	1.615.804.250	1.705.791.459
	B. Pegawai	1.062.606.762	1.027.873.510	1.090.373.896	1.156.361.374	1.227.141.673	1.290.304.114
	B. Hibah	19.539.575	22.309.113	24.136.391	27.670.488	33.338.110	41.672.638
	B. Bansos	10.940.000	12.034.000	13.237.400	14.561.140	16.017.254	17.618.979
	B. Bagi Hasil	8.645.662	9.078.029	9.743.081	10.458.890	11.229.419	12.058.942
	B. Bant Keu	311.995.756	284.071.439	296.771.177	309.565.162	325.077.794	341.136.786
	B. Tak Terduga	2.000.000	2.500.000	2.500.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
2	B. Langsung	735.238.813	746.694.258	776.992.524	810.579.824	844.213.805	893.711.756
	B. Pegawai	68.481.299	52.268.598	54.389.477	56.740.588	59.094.966	62.559.823
	B. Barang & Jasa	286.656.943	306.144.646	318.566.935	332.337.728	346.127.660	366.421.820
	B. Modal	380.100.571	388.281.014	404.036.112	421.501.508	438.991.179	464.730.113
	SURPLUS/ DEFISIT	(63.029.114)	17.125.000	15.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
C	PEMBIAYAAN						
1	Penerimaan Pembiayaan	75.261.114	-	-	-	-	-
	SILPA	75.000.000	-	-	-	-	-

No	URAIAN	PREDIKSI (dalam 000)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Pinjaman Daerah	261.114	-	-	-	-	-
	Penerimaan Kembali	-	-	-	-	-	-
	Penerimaan Piutang	-	-	-	-	-	-
2	Pengeluaran Pembiayaan	12.232.000	17.125.000	15.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
	Penyertaan Modal	12.232.000	17.125.000	15.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
	Pembayaran Utang	-	-	-	-	-	-
	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-
	Pembiayaan Netto	63.029.114	(17.125.000)	(15.000.000)	(10.000.000)	(10.000.000)	(10.000.000)
	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN	-	-	-	-	-	-

Sumber data: DPPKAD Kabupaten Boyolali